



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM
2. Jabatan : MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3. NHK : 712194

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 50.981.969.850**

1. Tanah Seluas 24739 m2 di KAB / KOTA ROTE NDAO, HASIL SENDIRI Rp. 176.883.850
2. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.160.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/166 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.981.210.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 567 m2/485 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 15.741.621.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 885 m2/256 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 26.922.255.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 2.663.582.550**

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.026.582.550
3. MOBIL, AUDI Q5:2.0 TF31 AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.475.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 752.313.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. 1.305.855.289.957**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 5.717.368.068**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 2.900.000.000

**Sub Total**

Rp. 1.368.870.523.425

**III. HUTANG**

Rp. 193.822.906.829

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 1.175.047.616.596

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.